



**Dengar Kesaksian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh:
Menyediakan Ruang bagi Korban Penyiksaan untuk
Menyuarakan Kebenaran dan Harapan**

29 November 2018
Banda Aceh, Indonesia

“Saya merasa lega”, ujar pemberi kesaksian pertama ketika ditanya bagaimana perasaannya di hari pertama acara Dengar Kesaksian di Kompleks Anjong Mon Mato, Banda Aceh pada 28-29 November 2018. KKR Aceh menggelar dengar kesaksian pertama bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi pada masa konflik di Aceh pada 1976-2005. Sebanyak empat belas korban dan tiga orang ahli memberikan kesaksian dalam acara ini.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah mekanisme non judicial yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM, mengakui keberadaan korban dan untuk merekomendasikan reparasi bagi korban pelanggaran HAM serta mereformasi institusi.

KKR Aceh adalah mandat dari qanun No. 17/2013 dan Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005, sebagai upaya untuk memperkuat perdamaian. Lembaga Negara independen ini adalah komisi kebenaran dan rekonsiliasi pertama di Indonesia. Hingga saat ini, KKR Aceh telah mengumpulkan 700 pernyataan dari korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

Dalam pidato pembukakan, Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi menyatakan, “Semoga kesaksian Bapak dan Ibu nantinya dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua agar generasi penerus bangsa ini mampu mengambil pembelajaran terbaik dari peristiwa masa lalu dengan harapan peristiwa kelam tidak terulang kembali. Insya Allah KKR Aceh akan merekomendasikannya kepada pemerintah berdasarkan standar universal hak korban.” Dalam pidato penutupannya, Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haytar menyatakan, “Acara dengar kesaksian ini adalah sejarah baru yang memberikan ruang untuk mendekatkan korban dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.”

Sementara itu, Direktur AJAR, Galuh Wandita menyatakan, “Selama dua hari ini kita menyaksikan dan mendengar cerita-cerita kesakitan dan sepenuhnya mengabaikan rasa kemanusiaan dalam praktek penyiksaan yang terjadi di Aceh. Bagi banyak penyintas, ini adalah saat pertama mereka berbicara terbuka tentang kekerasan yang tersembunyi yang telah mereka alami. Pengakuan publik ini adalah langkah awal menuju pemulihan dan merebut kembali martabat manusia.”

AJAR meminta pemerintah Aceh dan pemerintah nasional untuk mendukung KKR Aceh dalam melaksanakan langkah-langkah selanjutnya:

- a. Menjalankan rekomendasi lanjutan kepada pemerintah Aceh dan nasional, khususnya berkenaan dengan hak bagi korban untuk mendapatkan reparasi mendesak berdasarkan standar universal, menyelenggarakan rekonsiliasi serta mereformasi institusi.
- b. Mendukung KKR Aceh sepenuhnya untuk melaksanakan mandatnya, termasuk pengambil pernyataan lanjutan dan menganalisis untuk menggambarkan pola dan sebab dari pelanggaran HAM yang terjadi di masa konflik Aceh.
- c. Meminta informasi dan dokumen kepada aparat militer dan aparat sipil pemerintah serta institusi independen (dalam lingkup Aceh dan nasional) berkenaan dengan pelanggaran HAM yang dialami oleh para pemberi kesaksian, sehingga kekerasan serupa tak terulang lagi di masa yang akan datang.

Contact Person: Indria Fernida, AJAR Regional Coordinator, ifernida@asia-ajar.org or +62 816 1466361

###